

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mustafa, Delly. 2013. *"Birokrasi Pemerintahan"*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. *"Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafrie, Wirman. 2012. *"Studi Tentang Administrasi Publik"*. Jakarta: Erlangga
- Agustino, Leo. 2006. *"Dasar-dasar Kebijakan Publik"*, Bandung: Alfabeta,;
- Dwiyanto, Agus. dkk. 2002 *"Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia"*,
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah
Mada,;
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1997. *"Membangun Visi dan Reorientasi Kinerja Aparatur Daerah Menjawab Tantang Masyarakat Indonesia Baru"*,
Manajemen dan Pembangunan, No. 19 Tahun V, April, Jakarta: Bappenas;
- Manan, Bagir. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta:
P.T. Sinar Harapan,;
- Wijaya, Kusumah., 2011. Dwitagama Dedi. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*.
Jakarta: PT. Indeks,.
- Solichin Abdul W, 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM
Press, 2011)
- Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*
(Jakarta: Gramedia, 2004),

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Umum di

Kantor Pelayanan Terpadu

Jurnal

Nahdiyah, Laily. (2012). “Manajemen Publik Perspektif *New Public Management* (NPM) Di Badan Pendidikan Dan Latihan (Bandiklat) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nuh, Muhammad.(2013). “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Tenaga Kerja Sektor Publik”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Tome, Abdul Hamid. (2012). “Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan *good governance* ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010”. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.